

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transparansi di dalam pemerintahan akhir-akhir ini memang mulai terus digalakkan, baik itu di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintah daerah pun mulai melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi. Berawal dari Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 1998 yang kemudian mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenang untuk pengelolaan keuangan kepada daerah sehingga daerah dapat membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri atau yang biasa kita sebut sebagai otonomi daerah . Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi.

Penelitian ( Priyono et al., 2020) menyebutkan bahwa Perubahan sistem menjadi desentralisasi ini pada akhirnya memberikan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan penerapan pola pemerintahan yang terdesentralisasi atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, maka akan dapat memberika n kewenangan pengelolaan pemerintahan dari pusat kepada daerah.

Penelitian (Sutapa et al., 2018) juga menyebutkan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan suatu perwujudan otonomi daerah yang diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah yang dimiliki pemerintah daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya

disebut PAD untuk membiayai urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Melalui hal ini pada akhirnya akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap daerahnya dan juga mendorong kreativitas dan kerja sama pemerintah dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan daerah tersebut sesuai dengan potensinya. Jadi, pada akhirnya maju atau tidaknya suatu daerah itu nanti tergantung pada bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Pada dasarnya Otonomi daerah ini memang sangatlah perlu dilaksanakan untuk melihat seberapa mana kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah serta mengelola sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah . Hal ini agar daerah tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat serta bisa digunakan sebagai salah satu tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Sebagaimana suatu manajemen harus selalu dinilai dalam mencapai yang telah ditetapkan sebelumnya (Verawaty dkk., 2017)

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang telah dipercayakan oleh pemerintah pusat adalah dengan mengukur kinerja keuangan daerah tersebut.

Pengukuran kinerja dapat menggunakan 3 rasio yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio efektivitas . Pengukuran kinerja keuangan ini juga akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mencapai transparansi kinerja dan mewujudkan pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintah daerah.

Salah satu masalah keuangan yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan daerah tersebut kurang mampu mengembangkan potensi daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial (Kurniawati dkk., 2017). Sumber pendapatan itu adalah pendapatan asli daerah. Yang dimaksud Pendapatan asli daerah disini seperti yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Budianto, 2016) .

Sumber pendapatan asli daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah. Seperti juga yang dihadapi oleh Kota Kediri, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri periode 2016-2020 memiliki beberapa masalah keuangan daerah. Beberapa masalah keuangan daerah yang dihadapi

Kota Kediri meliputi: (1) Ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih besar , hal ini tercermin dari besarnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, (2) Kapasitas daerah masih rendah untuk menjelajahi potensi sumber pendapatan lokal hal ini tercermin dari relatif kecilnya pendapatan yang diperoleh dari PAD daerah dibandingkan dengan pendapatan transfer, (3) Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Kediri juga masih tergolong rendah yaitu masih berada dibawah 50%.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kemandirian**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PAD(Rp)</b>	<b>Pendapatan Transfer(Rp)</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>
2016	238.318.315.508,41	922.540.893.563,00	25,83%
2017	293.065.134.148,36	935.968.238.485,00	31,31%
2018	249.093.229.531,44	978.609.583.937,00	25,45%
2019	266.745.042.377,64	1.042.645.161.163,00	25,58%
2020	253.814.121.450,00	989.006.560.740,00	25,66%
<b>Rata-rata</b>			<b>26,78%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Kediri (Data Diolah)

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang terbesar. Kemudian besarnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian, hal ini dikarenakan pemerintah daerah dapat menggunakan PAD secara lebih bebas tidak seperti pendanaan yang berasal dari sumber eksternal (Kurniawati dkk., 2017). Maka penting bagi pemerintah daerah untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, karena penambahan

pendapatan asli daerah dapat mengindikasikan kinerja keuangan daerah yang baik (Lathifa, 2019). Hal ini seperti yang diungkapkan pada hasil penelitian oleh Antari dan Sedana (2018) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun ada juga Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wibowo (2017) yang justru mendapatkan hasil yang sebaliknya yaitu PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan juga jadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang juga dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti yang tercantum di dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 dimana disitu disebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga menemukan perbedaan hasil. Hasil penelitian yang dilakukan Aziz (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima suatu daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, pada hasil penelitian yang dilakukan Andirfa et al. (2016) ditemukan fakta bahwa semakin tinggi dana perimbangan

yang diterima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun. Semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Sanga et al., 2018). Uraian tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini sangat penting karena masih banyak permasalahan yang terjadi di Kota Kediri.

Pengukuran kinerja ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi untuk pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai informasi publik kepada masyarakat dandisini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2016-2020**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri
- b. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri
- c. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kediri.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan daerah Kota Kediri
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini sebagai sarana memberikan informasi kepada masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Kediri
- c. Bagi civitas akademika UPN “Veteran” Jawa Timur, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis.
- d. Bagi penulis dan para pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan, khususnya ilmu akuntansi sektor publik